

Andre Ristian,

andrerystian@yahoo.com

Peneliti Lintas Studi Demokrasi Lokal
BangkaBelitung

***Demokrasi dan Kekuasaan Politik
Calon Incumbent***

Abstrak

Demokrasi yang selama ini diidam-idamkan banyak rakyat untuk mencapai satu kesejahteraan, ternyata tidak lebih dari sekedar "mainan" yang dipermainkan oleh elit politik. Ungkapan "sinis" di atas akan diruaikan dalam tulisan ini guna melihat gambaran kekuatan politik yang berkuasa di arena demokrasi lokal di era reformasi. Penelitian ini penting untuk dibahas secara ilmiah karena besarnya harapan masyarakat untuk perbaikan politik (khusus untuk lokal) terutama setelah penerapan pasca reformasi otonomi daerah. Faktanya adalah demokrasi yang berjalan di tingkat lokal gagal untuk mensejahterakan dan membalikkan keadaan seperti yang diharapkan. Keuntungan dari posisi incumbent untuk menggunakan sumber daya kewarganegaraan pada frame birokrasi dan pelayanan publik kamuflase tercakup dalam "APBD" menimbulkan dampak negatif pada demokrasi. Adapun pertanyaan substansial dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi demokrasi dengan kekuatan pasangan incumbent, kekuatan incumbent serta actor yang bermain dalam pemilukada Bangka-Belitung tahun 2013. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif khususnya studi pustaka. Hasil EkoTrus sebagai incumbent memainkan semua peran dan sumberdaya untuk memenangkan pertarungan di Pemilukada Bangka Belitung tahun 2013.

Kata Kunci : *PEMILUKADA Belitung, Incumbent, Demokrasi*

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) adalah tanda kembalinya semangat penegakan paham-paham demokrasi yang otentik (Ilham Yamin: 2012). Pemilukada juga bentuk dari semangat menjalankan demokreasi (khususnya di tingkat local) yang menandai masa transisi dari Orde Baru yang sangat sentralisasi (otoriter) kearah yang lebih desentralisasi. Erb & Priyambudi (2009:17) mengatakan bahwa pada tahun 2004 Indonesia memiliki pengalaman untuk pertama kalinya untuk langsung memilih pemimpin nasional mereka dan ini adalah momentum awal demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah merupakan aspek baru dari demokrasi yang itu untuk meratakan pendidikan politik, pemerataan kesejahteraan serta

mengajarkan nilai-nilai luhur dari demokrasi.

Demokratisasi adalah kekuatan masyarakat setempat (lokal) untuk membuat keputusan untuk kepentingan para pemimpin lokal dan regional melalui pemilihan langsung. Namun, domain demokrasi di tingkat lokal sepertinya telah menghasilkan pembusukan dan pembodohan politik dan demokrasi. Tujuan demokrasi telah berbelok arah yang tadinya untuk kesejahteraan masyarakat kini menjadi ajang pertarungan elit local memperebutkan mahkota kekuasaan. Bahasa demokrasi menjadi sumir, apakah demokrasi bersuara ideal atau demokrasi yang "nakal" yang hanya mementingkan kepentingan elit lokal yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat (*public of interes*).

Sejak pertama Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) dilakukan secara langsung di Indonesia pada Juni 2005 sampai saat ini, masalah selalu muncul setiap kali Pemilukada diadakan. Masalah seperti penggugatan hasil Pilkada, kecurangan, politik uang (*money politic*), kampanye hitam, pembakaran fasilitas-fasilitas negara dll. Berdasarkan data dari Crouch (2010), seorang peneliti demokrasi telah mengungkapkan bahwa, setidaknya ada 7 Gubernur, 45 Bupati / Walikota dan wakil-wakil mereka telah dihukum karena beberapa kasus. Bukan hanya itu di banyak tempat justru dengan adanya Pemilukada situasi politik sekakin tidak stabil dan keamanan masyarakat terganggu akibat konflik yang ditimbulkan dari proses Pemilukada itu sendiri, contoh rilnya di Maluku Utara, Madura, Kabupaten Palopo dan lain-lain.

Hasil dari studi pemilu oleh Mietzner (2007) dalam Erb dan Priyambudi (2009: 3-4) menyebutkan bahwa desentralisasi menghasilkan preman (gangster), politik uang, dan korupsi (korupsi) di tingkat lokal. Banyak pandangan pesimis dari para ahli politik dan desentralisasi mengenai kemanfaatan dari Pemilukada itu sendiri.

Kekuasaan politik melalui praktik demokrasi lokal menghasilkan masalah. Masalah Pemilukada menandakan konfigurasi dan kualitas politik dan demokrasi ditingkat lokal belum matang. Seperti ada kekagetan dari elit politik lokal menyambut otonomi politik. Banyak kasus calon gubernur, bupati/walikota khususnya incumbent memanfaatkan fasilitas negara. Calon incumbent memang diuntungkan

karena akses sumberdaya otomatis lebih dekat, gerakan politik dapat saja luwes, kampanye gratis mudah didapatkan. Oleh sebab itu tulisan ini mencoba menjelaskan posisi incumbent dalam konteks studi kasus Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di Bangka Belitung Tahun 2012.

Sebelum lebih lanjut membahas masalah ini, kita melihat praktek kekuasaan yang berkuasa yang telah dipelajari oleh banyak "ulama" politik sebelumnya. Studi tentang demokrasi dan kekuasaan politik oleh Gordon dan Landa (2009: 1481) menemukan bahwa incumbent ingin melawan karena ketersediaan sumber daya, seperti memegang atau disebut diskon kampanye dana kampanye yang tidak tersedia bagi lawan. Dukungan dari incumbent ini berguna untuk membangun hubungan untuk mempengaruhi kelompok kepentingan atau elit dalam kabupaten / kota. Selain La Venia (2011:9) menyatakan bahwa sebagai pemegang kekuasaan politik, incumbent memiliki banyak keuntungan untuk maju ke Pilkada berikutnya. Ini mengurangi dampak dari nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan dianggap tidak adil bagi penantang. Selain itu, partai politik seharusnya dapat memenangkan kekuasaan melalui pemilu.

Setelah meninjau berbagai penelitian, posisi incumbent untuk tingkat lokal seperti Provinsi, kabupaten / kota jaminan konstitusional negara yang diberikan kepada pejabat yang memiliki kekuatan untuk bertarung di periode kedua. "Ruang" untuk bergerak maju pada periode berikutnya secara harfiah disebut incumbent. Mengapa hal

ini menjadi penting untuk pembelajaran? Pertanyaan ini penting untuk melihat tingkat arena demokrasi lokal yang telah terkontaminasi oleh berbagai praktek-praktek politik yang digunakan untuk mencapai tujuan, khususnya yang melibatkan incumbent. Intervensi kekuasaan politik melemahkan Panitia Pengawas Pemilihan umum bahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Kontrol akan kekuatan dimainkan oleh masyarakat sipil tampak tak terbendung dengan cepat goyangan daya menjabat maju. Tulisan ini akan membahas relasi demokrasi dengan kekuatan politik, aktor yang bermain serta menakar kekuatan politik incumbent dalam hal ini adalah pasangan Dr. Ir. H.Eko Maulana Ali. Msc dengan H. Rustam Effendi. BA Pada Pemilukada Bangka Belitung 2012.

B. Perumusan Masalah

Melihat pada latar belakang di atas maka menarik untuk dijawab pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah, bagaimana relasi demokrasi yang diwujudkan dengan pemilu khususnya pemilukada di Bangka Belitung terhadap kekuasaan calon petahana atau incumbent dan bagaimana calon incumbent memaksimalkan "amunisi" yang ada dalam memenangkan pertarungan dalam pemilukada.

C. Kerangka Teori Relasi Demokrasi dan Kekuatan Incumbent

Menurut Schumpeter (1976) dalam Ilham Yamin (2012) konsep minimalis demokrasi bisa kita pahami seperti berikut ini :

"Apakah berdebat untuk konseptualisasi minimalis demokrasi dan hak-hak sipil atau 'mematuhi kehendak rakyat secara langsung' tidak perlu bagi pemerintah untuk menjadi demokrasi dengan fungsi yang pas. Demokrasi hanyalah sebuah metode, dan lembaga-lembaga yang digunakan di dalam, memilih pemerintah melalui pemilu yang kompetitif. melalui pemilu ini, wakil-wakil yang dipilih, dan kesejahteraan umum berasal dari penghitungan suara. ini adalah kompetisi untuk representasi yang mendorong demokrasi, dan melalui kompetisi ini bahwa manfaat bahwa warga memperoleh dari demokrasi dalam bentuk-bentuk pemerintahan."

Sejalan dengan pandangan ini, para pemilih memilih wakil-wakil mereka melalui metode demokratis (pemilihan langsung) sehingga tercipta pemerintah yang akan melayani rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun, sebelum penciptaan pemerintahan ini harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Hal ini disebut oleh Schumpeter dalam hal demokrasi sebagai metode seleksi berdasarkan hak pemilih untuk menghasilkan pilihan, diwujudkan menjadi bentuk pemerintahan. Demokrasi berdasarkan penelitian banyak ahli menghasilkan tentang kondisi untuk mengkonsolidasikan demokrasi seperti yang disebutkan: bagaimana infrastruktur pemerintahan dan demokrasi berinteraksi satu sama lain, sementara bersama-sama mempengaruhi negara, harus dilakukan

dengan kemungkinan bahwa tata kelola adalah prasyarat untuk konsolidasi demokrasi".

Berdasarkan pelbagai pandangan tentang penerapan konsep derajat demokrasi sebagai sistem politik, Baird (2012:272) menemukan konsep struktur *Infra Governance* yang terdiri dari empat elemen, yaitu: 1) efektivitas pemerintahan, 2) kualitas regulasi, 3) aturan hukum, 4) pengendalian korupsi. Pandangan Baird adalah pijakan yang mengungkapkan bagaimana demokrasi lokal hidup dan berkembang dengan baik melalui pesta demokrasi lima tahunan di Bangka Belitung tahun 2012. Namun, empat elemen ini kerap kali dipelintir oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa melalui penggunaan komisi pemilihan umum (KPU), penundaan pengawasan pemilu sehingga mereka dapat kembali berkuasa.

Argumen lain tentang konsep demokrasi sebagai sistem politik menurut Larry Diamond, Juan Linz dan SM Lipset (1990) dikutip dalam Ilham Yamin (2012) mendefinisikan demokrasi apabila merujuk pada sistem pemerintahan adalah :

"Demokrasi itu memenuhi tiga syarat : bermakna dan luas persaingan antar individu dan kelompok yang ter-organisir (pihak terutama politik) untuk semua posisi yang efektif kekuasaan pemerintah, secara berkala dan termasuk penggunaan kekuasaan, secara berkala dan tidak termasuk penggunaan kekuatan, tingkat sangat inklusif partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui

pemilihan teratur dan adil, sehingga tidak ada (dewasa) kelompok sosial besar dikeluarkan, dan tingkat sipil dan politik ekspresi kebebasan-kebebasan, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung organisasi - cukup untuk Menjamin integritas kompetisi politik dan partisipasi "

Pengembangan konsep dan teori demokrasi menanggung beberapa pandangan ke depan oleh Dahl (1989:233), yaitu peranan lembaga-lembaga demokratis untuk bersandar proses demokrasi normatif yang disebut poliarki dengan karakteristik sebagai berikut: 1) kontrol atas keputusan pemerintah yang tersembunyi melalui pejabat terpilih secara konstitusional, 2) pejabat terpilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil periodik, 3) praktek dari seluruh orang dewasa untuk memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, 4) praktek dari seluruh orang dewasa untuk memiliki hak untuk menjalankan di pemilihan petugas, 5) warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan secara bebas dalam isu-isu politik, 6) sumber-sumber alternatif dari informasi hukum dapat digunakan secara cuma-cuma, 7) setiap orang memiliki hak untuk membentuk partai, kelompok-kelompok tekanan, dan negara merdeka.

Untuk mengkritik konsep lain lembaga-lembaga demokratis, memandang bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah untuk mempromosikan demokrasi (Koirudin :2004). Untuk hal ini kita perlu melihat kembali hasil peran partai politik yang

berjuang untuk mendapatkan jumlah pemilih yang sering terjebak dengan praktik politik yang dilakukan dengan berbagai cara. Studi yang dilakukan oleh Yadav (2012:1032) pada 64 negara-negara demokratis di 1984-2004 menemukan bahwa pengaruh kebijakan partai politik dan korupsi elit politik merupakan masalah kronis yang dihadapi dalam mengumpulkan cukup uang untuk mem-bayar biaya tinggi politik dalam demokrasi. Selain itu, studi tentang partai politik sering menggunakan taktik politik yang ilegal. Disamping itu, sarjana Bryan & Baer, (2005:33) dalam Ilham Yamin (2012) menjelaskan bahwa partai politik menggunakan taktik pemilu ilegal termasuk membeli suara, menyewa preman untuk mengintimidasi lawan, dan mengisi kotak suara

Pembahasan konsep demokrasi dan kekuasaan politik yang disebutkan oleh Haugaard (2010:1049) menjelaskan bahwa demokrasi adalah bangunan yang rapuh yang membutuhkan bentuk khusus dari kekuasaan dan persepsi otoritas dengan cara membangun system yang kuat. Kekuasaan politik adalah kekuatan yang ditaklukkan oleh otoritas, berdasarkan tindakan yang diambil. Kewenangan mem-butuhkan demokrasi yang berisi tentang kesetaraan norma, norma keseimbangan, tertib, bertanggung jawab. Untuk jangka kekuasaan politik di sini akan membahas kewajiban tertentu dengan beberapa sarjana politik lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Gordon dan Landa (2009) meneliti pengambilan menjabat menjadi sumber daya yang berguna bagi dirinya atau yang lebih dikenal sebagai

"kampanye gratis." Ini memiliki dampak untuk biaya yang lebih kecil untuk melawan kembali. Dibandingkan dengan penantang atas meningkatnya biaya untuk kampanye, dan dukungan incumbent menimbulkan keuntungan yang unik dengan kemampuan untuk terlibat dengan kelompok ke-pentingan atau elit di tingkat local baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Relasi demokrasi dengan kekuatan politik yang dimainkan oleh incumbent sering berbelok arah. Demokrasi seperti masti suri karena ulah taktik jahat incumbent yang kadang kala menghalalkan segala cara untuk mempertahankan ke-kuasaan. Demokrasi menjadi hampa nilai-nilainya karena kejahatan itu. Demokrasi hanya dipantang prosedur mendapatkan kekuasaan sehingga demoktrasi tidak dianggap sebagai nilai luhur dan alat untuk mengantarkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pada umumnya ada beberapa keuntungan yang diperoleh incumbent dalam pertarungan dalam kompetisi pemilukada. *Pertama*, kelesuan politik: pemilih cenderung memilih incumbent yang relevan dengan pepatah "Jika tidak pecah, jangan memperbaikinya". *Kedua*, dapat belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya keberhasilan biaya, apapun pekerjaan politik selama masa jabatannya, dan kesalahan perbaikan untuk bersaing lagi. *Ketiga*, incumbent mampu menyatukan pihak, sehingga kesulitan penantang memperbaiki keretakan pada saat pemilu,. *Keempat* mampu mengendalikan setiap peristiwa, merangsang ekonomi, dan mampu mengendalikan agenda. *Kelima*, harus mampu kampanye tanpa kampanye

“Kampaye siluman” hal ini biasanya dilakukan menjelang pemilukada dengan pemasangan iklan layana masyarakat di penjuru wilayah provinsi yang itu dibiayai oleh APBD. *Keenam*, mengklaim bahwa itu adalah calon yang mampu melewati perubahan “*Beribukti bukan janji atau lanjutkan...!*”.

Penelitian melihat kompetensi incumbent (usia, latar belakang pendidikan), untuk kembali melawan status, dan kepemilikan. Ada kekhawatiran tentang adanya inovasi lokal melalui pertumbuhan sumber daya keuangan daerah. Misalnya mendekati pemilukad biasanya porsi bantuan social atau hibah dalam fostur APBD menjadi membengkak. Bantuan social dan hidah merupakan cela “gurih” yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan lumbung dana kampanye dan usaha festivalisasi kebaikan seorang incumbent.

D. Pembahasan

Menakar Kekuatan Incumbent

Pemilukada Bangka Belitung berlangsung pada tanggal 12 Februari

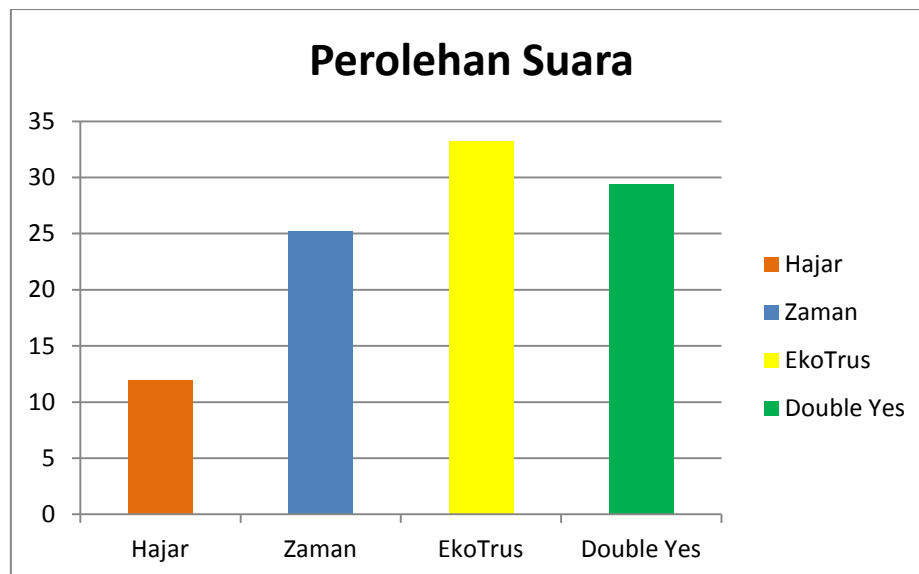
2012 ,diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan nomor urut satu ada H.Hudarni Rani-Justiar Noor (Hajar) diusung Partai Hanura dan Gerindra. Nomor urut dua ada Zulkarnain Karim-Darmansyah Husaien (Zaman) yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN, di nomor urut tiga ada calon petahana (Incumbent) Dr. Ir. H Eko Maulana Ali. Msc berpasangan dengan H. Rustam Effendi.BA (Eko-Trus) pasangan ini didukung oleh partai besar yaitu Golkar, PDI-P, PKS, PKB dan partai non parlemen lainnya, dan pasangan terakhir adalah Yusron Ihza-Yusroni Yazid (Yusro) yang diusung oleh partai PPP dan PBB.

Dari hasil yang dirilis oleh KPUD Bangka Belitung dalam sidang Pleno memenangkan pasangan Eko Maulana Ali-Rustam Effendi dengan perolehan suara yang sangat signifikan yaitu 169.790 atau 33,2% dari seluruh jumlah suara yang sah. Dengan dimenangkannya pasangan Eko Maulana Ali-Rustam Effendi maka incumbent atau petahana kembali berkuasa.

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2012

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Prosentase
1	Hudarni Rani-Justiar Noor (Hajar)	61.185	11,9%
2	Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein (Zaman)	129.193	25,2%
3	Eko Maulana Ali-Rustam Effendi (EkoTrus)	169.790	33,2%
4	Yusron Ihza-Yusroni Yazid (Double Yes)	150.643	29,4%

Sumber : KPUD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012.



Membaca kekuatan politik calon incumbent dalam hal ini adalah Eko Maulana Ali-Rustam Effendi memang menarik. Eko Maulana Ali merupakan mantan Bupati Kabupaten Bangka dua priode, Eko Maulana Ali juga adalah ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung sedangkan pesangannya Rustam Effendi adalah anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dan menjadi ketua DPD PDI-P Bangka Belitung. Kedua calon ini secara dukungan politik di parlemen sangat kuat PDI-Perjuangan menguasai 8 Kursi, Golkar 7 dan PKS 3 kursi dari total 45 kursi yang ada.

Dalam Pilkada 2012 yang lalu, Maulana Ali-Rustam Effendi menang di 4 Kabupaten dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Bangka Belitung. Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Kab. Bangka menjadi lumbung suara dari pasangan ini. adalah Eko Maulana Ali-Rustam Effendi hanya disaingi oleh pasangan nomor urut 4 yaitu Yusron Ihza-Yusroni Yazid. Yusron Izha adalah adik kandung dari Yusril Izha Mahendra. Yusron adalah putra kelahiran Belitung yang

menggandeng Bupati Bangka. Persandingan kedua pasangan ini bukan saja persaingan antara toko atau figur namun jauh dari pada itu ada sentimentil feodalisme antara pulau Belitung dan Bangka sendiri. Tidak dapat dipungkiri jumlah penduduk di Pulau Bangka jauh lebih besar dari penduduk pulau Belitung. Sentimen ini sudah sangat terasa dalam masa-masa kampanye dimana isu putra daerah kencang sekali berhembus. Namun mengapa incumbent masih bisa mempertahankan kekuasaannya?. Mari kita lihat alasan dan faktor kemenangan.

Pengusaan Sumber daya

Sebagai pasangan incumbent tentu-nya Eko Maulana Ali-Rustam Effendi memiliki akses lebih terhadap sumber daya (*Resource*), baik sumber daya finansial, aparatur, politik bahkan sumber daya fasilitas negara. Incumbent tentu saja dapat memegang peranan penting dalam mengelolah politik anggaran keuangan. Disinilah cela yang dimanfaatkan oleh calon incambent untuk mengelembungkan financial. Modus yang dilakukan adalah dengan

cara menaikkan anggaran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat dan dana Hibah. Dari APBD tahun 2011 ke 2012 ada kenaikan sekitar 289 Milyar untuk bantuan sosial serta 89 Milyar untuk bantuan hibah. (Bangkapos.com Akses 12 Feb 2014) Artinya dari data ini incumbent memanfaatkan uang negara (daerah) untuk meningkatkan citra baik dengan cara kedermawaannya. Eko Maulana Ali-Rustam Effendi kerap bersama-sama dalam satu kesempatan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial di salurkan kepada LSM, Rumah Ibadah, Panti Asuhan, Nelayan, Pedagang dan lain-lain.

Sumber daya aparatur, sebagai Bos Eko Maulana Ali-Rustam Effendi tentunya memiliki akses kepada para birokrat mulai dari pejabat RT samapi Sekda sekalipun. Keberadaan birokrat dalam pertarungan politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Kades dan perangkat kecamatan walaupun dilarang berpolitik praktis namun masih menjadi mesin memburuh suara yang efektif, karena mereka selalu bersentuhan (interaksi) secara langsung kepada masyarakat yang itu tentunya adalah konsituen. Jika Eko Maulana Ali-Rustam Effendi memegang kendali perangkat Kecamatan dan Kades di seluruh Bangka Belitung maka dengan mudah suara akan diperoleh. Pada tingkat kepala dinas pun kadang kala selalu dimanfaatkan.

Eko Maulana Ali-Rustam Effendi sebagai incumbent juga diuntungkan

dengan masa kampanye politik yang lebih panjang dari pasangan lainnya. Incumbent dalam hal ini bisa saja berkampanye politik dengan menggunakan fasilitas negara. Biasanya incumbent akan memasang spanduk dan foster berukuran besar, namun diselangi dengan kampanye program-program kebijakan pemerintah daerah. Bukti kongkritnya adalah pada tahun 2012 saja belanja publisng dan iklan di Bangka Belitung naik 3 milyar. Berdalil mensosialisasikan program pemerintah tapi mencantumkan nama incumbent dalam titipan politik yang amat klise itu.

Koalisi Tiga Partai Besar

Dilihat dari komposisi partai pengusung memang Eko Maulana Ali-Rustam Effendi sangat diuntungkan. Sudah sejak lama Bangka Belitung merupakan basis suara Partai PDI-P dan Golkar. Diparlemen saja kedua Parpol ini ditambah PKS, menguasai 18 kursi dari 45 kursi belum lagi di tambah partai koalisi PKS dan PKB yang memegang 6 kursi di DPRD. Kekuatan politik jelas menguntungkan pasangan incumbent. Kekuatan politik dari Parpol Golkar-PDI-P pun sudah tidak diragukan lagi di mana dimasing-masing Kabupaten/Kota PDI-P dan Golkar menjadi pemenang di kursi parlemen, kecuali di Kabupaten Belitung Timur yang dikuasi oleh PBB, itu pun karena tempat kelahiran dewan syuro PBB yaitu Yusril Izha Mahendra. Berikut peta kekuatan politik di DPRD;

Tabel 2
Kekuatan Politik Parpol Pengusung di DPRD Provinsi

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Kursi
1	Hudarni Rani-Justiar Noor (Hajar)	Hanura, Grindra	5
2	Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein	Demokrat, PAN, PKPB, PKPI	10
3	Eko Maulana Ali-Rustam Effendi	Golkar, PDI-P, PKS, PKB, PMB,P.Patrriot	18
4	Yusron Ihza Mahendra-Yusroni Yazid	PPP, PBB	6

Sumber : Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Gerakan politik incumbent sungguh sangat inklusif 4 dari 7 kabupaten dikuasai dengan suara yang cukup mutlak, kekuatan incumben memang terletak pada kantong suara kabupaten yang ada di pulau Bangka. Walau sempat diisukan dengan isu korupsi dan berkinerja buruk namun incumben masih tetap berdiri tegak. Konsolidasi partai yang kuat serta pergerakan timsukses dan relawan yang massif membuat isu-isu korupsi tidak berkembang dengan baik sehingga tidak menjadi opini publik (*public opinion*) yang membahayakan posisi incumbent.

Dari sisi figur atau ketokohan Eko Maulana Ali masih mempunyai karisma yang dapat menciptakan "*public trust*". Publik melihat Eko Maulana Ali sebagai sosok pemimpin yang dapat men-sejahterakan masyarakat dengan asumsi perna membawah Kabupate Bangka dua priode. Politisi senoir partai Golkar ini telah berhasil membumikan

Golkar di Bangka Belitung yang sebelumnya di pegang oleh PDI-P.

Sosok wakilnya yaitu Rustam Effendi pun sangat familier di Belitung. Rustam Effendi adalah ketua DPD I PDI-P yang selam lima tahun ini me-ngnakodahi PDI-P. Rustam Effendi memiliki pengaruh besar di Pulang Belitung yang di tempati 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Rustam Effendi ditugaskan untuk meraup suara mayoritas di Belitung. Tagas Rustam Effendi tidak mudah karena ada calon lain yang juga menjadi keluarga elit di Belitung yaitu Yusron Izha Mahendra. Konstilasi politik partai di Belitungpun sangat mendukung incumbent karena kekuatan PBB semakin tergerus dengan invasi PDI-P. terbukti dari tahun ketahun suara PBB di Belitung semakin berkurang.

Di luar pegolakan politik antar kandidiat, ternyata posisi incumbent dapat juga masuk mengamankan segala

aktifitas kampanye politiknya. Terhitung setelah dimulainya masa sosialisasi Pilkada Bangka Belitung dan sampai masuk masa tenang, pasangan EKO-Rustam tidak satu kalipun dipanggil pihak Bawaslu. Artinya posisi incumbent yang sering memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye pun luput akan perhatian pengawas pemilu. Ada dua indikasi kenapa bisa seperti ini, pertama komisioner Banwaslu segan dengan kekuatan politik EKO-Rustam atau Banwaslu yang telah diredam segala aktifitasnya.

Sedangkan ketokohan Rustam Effendi di Pulau Belitung khususnya masih sangat kuat. Rustam Effendi merupakan anggota DPRD Belitung dua priode. Ketokohan Rustam Effendi secara umum masih kalah dibandingkan dengan "Izha Mahendra Family" manun Rustam Effendi memiliki basis masa PDI-P yang kuat baik di Bangka maupun di Belitung. Dengan kehadiran Rustam Effendi tentunya akan sangat membantu Eko Maulana Ali mengaik sekaligus memecah suara di kantong suara pulau Belitung yang di kuasai oleh Yusron Izha Mahendara dengan nomor urut 4. Kalkulasinya adalah Incumbend alam hal ini memperhatikan betul bagaimana geografis politik anatar Bangka dan Belitung. Incumben menempatkan

tokoh dari Belitung yang memiliki pengaruh kuat "Izha Mahendra Family".

Mengacu pada berbagai realitas politik pada Pemilukada Bangka Belitung Tahun 2012 jika didekatkan melalui konsep demokrasi oleh beberapa ulama politik yang ditemukan antara praktek menyimpang dengan konsep. Demokrasi hanya digunakan sebagai *mount* untuk melegitimasi kekuasaan pejabat incumbent dalam mempertahankan kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri ada peraktek "kotor" yang dilakukan oleh incumbent seperti memanfaatkan pasilitas negara, me-nekan Banwaslu, Hamar Politik kepada Parpol pengusung. incumbent me-manfaatkan posisi dan peran birokrasi pusat. PNS yang terlibat dalam beberapa dari tim pemenang. Selain itu, in-dependensi pemilihan dan lemahnya pengawasan masyarakat sipil me-ngakibatkan penurunan nilai-nilai demokrasi.

E. Para Aktor Politik Belitung

Dalam kompetisi berebutan kursi negeri "laskar pelangi" Bangka Belitung pada tahun 2012 yang lalu banyak actor-aktor yang bermain. Actor itu datang dari semua elemnt. Elit politik, pengusaha, alim ulama, dll. Kepentingan

mereka sendiri berbeda-beda mulai kepentingan ekonomi samapai kepentingan gengsi apakah Bangka Belitung di Pimpin oleh orang Bangka atau di Pimpin Belitung. Berikut peta singkat actor-aktor yang bermain;

Elit Politik Lokal

Dalam usaha memenangkan incumbent atau (EkoTrus) dibentuk semacam dewan pemenangan. Dewan ini bekerja sesuai intruksi pasangan (EkoTrus). Dewan pemenangan mencakup ke tiga partai pengusung, Dipa Malik, Azhar Romli dari Golkar, Didit Srygujaya, Ismiryadi dari PDI-P dan Ridwan Tholib dari PKS. Orang-orang ini bergerak dengan ruang mereka masing-masing.

Elit Pengusaha

Perperangan merebut kursi kepadala daerah sudah barang tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dibutuhkan milyaran rupiah untuk menggerakkan massa pendukung, logistic, hamar politi dan biaya lainnya. Pasangan (EkoTrus) sebagai incumbent

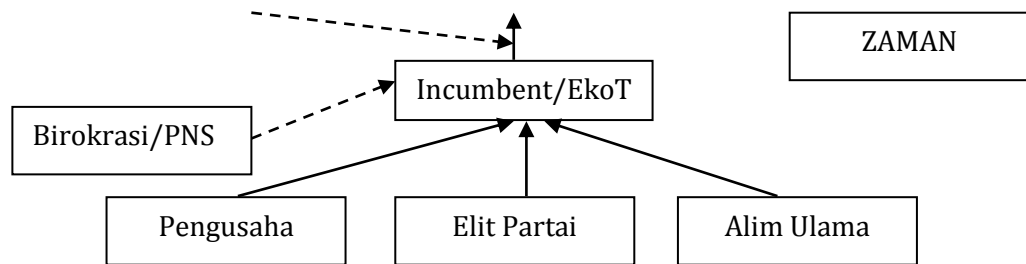
memang lebih menarik dimata pengusaha karena dapat saja dengan kontrak politik dalam artian penanaman modal politik pengusaha dapat mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Betul bahwasanya (Eko Trus) di dukung dalam segi finansialnya oleh beberapa pengusaha Bangka-Belitung. Misalnya melalui Perlindo, Hidayat Arsani dan pengusaha-pengusaha lain yang tidak terdeteksi (Bangka Pos ;edisi januari-februari).

Alim Ulama Lokal

Guna memaksimalkan pertempuran (EkoTrus) juga memanfaatkan posisi para ulama Bangka-belitung untuk mendukungnya. Ada bebrapa bukti kongkrit bagaimana (EkoTrus) hendak memanfaatkan ruang ini sebagai amunisinya. Kebijakan bantuan kerumah-rumah ibada serta bantuan gaji kepada pengurus masjid seluruh Bangka-Belitung merupakan signal bahwa (EkoTrus) hendak mengaet Alim Ulama Lokal untuk membantu memuluskan ke kursi Babel 1 dan 2

Gambar 1
Peta Elit Politik BABEL





Sumber : Analisis Peneliti 2013

Birokrasi/PNS

Sebagai incumbent, pasangan EkoTrus memiliki beberapa akses untuk memanfaatkan birokrasi/PNS dalam pertarungan Pemilukada. Walaupun tidak secara langsung dan terbuka birokrasi/PNS digunakan sebagai alat untuk menarik suara. Birokrasi/PNS dapat dimanfaatkan seperti memudahkan fasilitas Negara digunakan dalam kepentingan kampanye EkoTrus.

Oknum birokrasi/PNS dijadikan simpatisan atau timses EkoTrus terbukti ada Okum PNS yang memfasilitasi kampanye pasangan EkoTrus. Dan masih banyak actor-aktor yang terlibat dalam proses perebutan kekuasaan di Bangka Belitung. Masing-masing actor ini bermain pada ruang dan porsi masing-masing dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Dari pemaparan konsep relasi demokrasi dengan kekuatan incumbent yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa, betul sebagai incumbent memiliki keuntungan yang

lebih ketimbang pasangan non-incumben. Pasangan incumbenpun dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang ideal karena bagaimanapun incumbent lebih mudah dan dekat untuk melakukan kecurangan dalam pemilu-kada. Dalam konteks ini juga EkoTrus juga memanipulasi jurus yang sama. Pada momentum yang lainnya EkoTrus juga melakukan langka-langka politik yang membahayakan demokrasi seperti melibatkan birokrasi/pns sebagai tim pemenangan.

Ideal nya dari proses demokrasi dalam wujud pemilukada, baik incumbent ataupun non-incumben bermain pada ruang yang positif dimana aturan tidak ditambah, prosedur yang benar di lalui serta pencalonan itu akan bermuara pada kesejahteraan. Pemilukada harus dapat mewujudkan pendidikan politik yang elegan kepada masyarakat. Tidak boleh lagi ada Pemilukada yang mengakibatkan instabilisasi keamanan dan politik, pe-

ngerusakan fasilitas Negara dan konflik-konflik SARA dll.

Lalu dimana makna relasi demokrasi terhadap kekuasaan politik incumbent yang dipertanyakan di atas. Demokrasi yang substansial adalah tidak terbatas pada bagaimana demokrasi itu berjalan baik (adanya partai politik, pemilu dan kebebasan pers), tapi melainkan demokrasi untuk menciptakan satu tatan politik yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena substansi demokrasi demikian maka relasinya adalah calon incumbent tentunya menyadari demokrasi sebagai alat dan nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Incumbent tidak boleh lagi memanfaatkan segala keunggulan untuk mempertahankan kekuasaan. Incumbent tidaklah boleh menggunakan keutungan tersebut untuk "menipu" publik. Demokrasi harus dijalankan secara substansial. Menghalalkan segala cara seperti banyak dilakukan incumbent tidak boleh lagi dipraktekkan karena sesungguhnya itu adalah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sakli lagi incumbent harus di dudukan sama dengan kontestan non-incumben. Agar demokrasi berjalan satu arah dengan kesejahteraan rakyat.

F. PENUTUP

Tulisan ini telah menggarisbawahi bahwa penguasa selalu diuntungkan oleh posisi mereka saat ini. Kasus di di Pemilukada Bangka Belitung tahun 2012 menunjukkan realitasnya. Partai politik lokal hanya merupakan kendaraan untuk memberikan elite politik. Apalagi setelah memasuki periode kedua. Kewenangan untuk menetapkan pejabat Panwaslu kabupaten mengakibatkan pelanggaran pemilu. Demikian pula, anggota Komisi menentukan intervensi penyelenggara pemungutan suara menambahkan pelanggaran tersebut. Tentu saja, untuk kembali ke kekuasaan posisi pemanfaatan dan peran birokrat pusat untuk terlibat dalam berbagai tim pemenang seperti menambahkan fungsi kontrol sosial yang lemah dimainkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Harus ada system Pemilukada yang lebih "canggih" untuk dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran politik. Masyarakat harus dicerdaskan dari proses demokrasi agar pilihan rakyat semakin berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula. Agar semua tujuan dari demokrasi itu adalah melahirkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Capuno, J. J. (2011). Incumbents and Innovations under Decentralization: An Empirical Exploration of Selected Local Governments in the Philippines. *Asian Journal of Political Science*. 19(1) : 48-73.
- Crouch, H. (2010). *Political Reform in Indonesia After Soeharto*, Institute of Southeast Asian studies. Singapore.
- Dahl, R.A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Erb, Maribeth & Priyambudi Sulistiyanto. 2009. *Deepening Democracy Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Institute Of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Lazarus, Jeffrey. (2008). Incumbent Vulnerability and Challenger Entry in Statewide Elections. *American Politics Research*. 36 (1) : 108-129. Vanhanen, Tatu. 1997. *Prospect of Democracy a Study of 172 Countries*. Routledge, London and New York.
- Schumpeter , J. (2013[1976]). *Capitalism, Socialism, And Democracy*. Ctk I.Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Haugaard, M. (2010). Democracy, Political Power, and Authority. *Social Research*. 77(4): 2010.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Yamin, Ilham. *Democracy And Incumbent Political Power :Takalar Election 2007*. Incodec IPDN.

Sumber Online

- <https://riangold.wordpress.com/2011/03/14/rekor-korupsi-di-indonesia-dari-30-gubernur-17-gubenu-dinonaktifkan-karena-korupsi/> Rekor Korupsi Di Indonesia, dari 30 Gubernur 17 Gubeenur Dinonaktifkan Karena Korupsi, Bangkapos.com akses 12 Juni 2013.
- www.bangkapos.com Akses Januari 2014.